

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro N0. 1
Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
TERHADAP KEMISKINAN DI 16 PROVINSI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh:

Nama : Andika Pratama
NPM : 1951021008
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan
Dosen Pembimbing : Dr. Arivina Ratih, Y.T., S.E., M.M.



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN DI 16 PROVINSI DI INDONESIA

Oleh

ANDIKA PRATAMA

Inti dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Metode estimasi model regresi panel yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan artinya Penetapan upah minimum yang tinggi tidak berarti menandakan bahwa tingkat kemakmuran akan meningkat atau taraf kemiskinan akan berkurang. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap kemiskinan artinya menunjukkan bahwa secara parsial IPM dan PDRB mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Dengan melibatkan seluruh 16 Provinsi dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial UMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan sedangkan untuk IPM, PDRB sendiri mempunyai pengaruh negatif yang signifikan.

Kata Kunci: Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Produk Domestik Regional Bruto

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE, HUMAN DEVELOPMENT INDEX, AND GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT IN 16 PROVINCES IN INDONESIA

By

ANDIKA PRATAMA

The essence of this research is to determine the effect of provincial minimum wages, human development index, and gross regional domestic product on poverty in 16 provinces in Indonesia. The analysis technique used is multiple linier regression analysis. The panel regression model estimation method used is the Random Effect Model. The results of the analysis show that the provincial Minimum wage does not have a significant effect on poverty, meaning that setting a high Minimum wage does not necessarily indicate that the level of prosperity will increase or the level of poverty will decrease. Meanwhile, the Human Development Index and Gross Regional Domestic Product have a negative effect on poverty, meaning that partially HDI and GRDP have a significant negative effect on poverty. By involving all 16 provinces in modeling estimates, it shows that partially the UMP does not have a significant effect on poverty, while for HDI, GRDP itself has a significant negative effect.

Keywords: *Provincial Minimum Wage, Human Development Index, and Gross Regional Domestic Product*

**PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
TERHADAP KEMISKINAN DI 16 PROVINSI DI INDONESIA**

Oleh:

Andika Pratama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI,
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
TERHADAP KEMISKINAN DI 16 PROVINSI
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: Andika Pratama

Nama Pokok Mahasiswa

: 1951021008

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing



**Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.
NIP 198007052006042002**

MENGETAHUI

**a.n Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
Sekretaris Jurusan**



**Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.
NIP 198007052006042002**

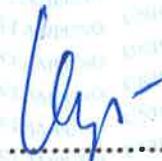
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M.



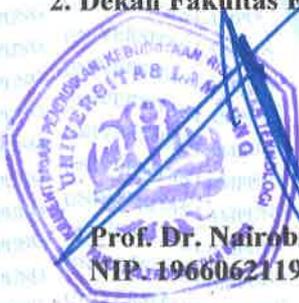
Penguji I : Moneyzar Usman, S.E., M.Si.



Penguji II : Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



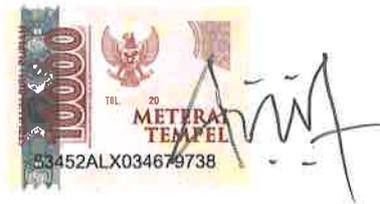
Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024



Andika Pratama

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Andika Pratama dilahirkan di Desa Durian, Kecamatan Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan pada tanggal 15 Juli 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syahrel Effendi dan Ibu Sri Astuti.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2006 di SD Negeri 155 Desa Durian dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di SMP Negeri 40 Desa Durian dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 07 Peninjauan dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat) di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis telah mengikuti organisasi kampus, yaitu Rois FEB pada tahun 2019 penulis menjadi Anggota.

MOTTO

Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam
(QS. Al- An'anm: 162)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah: 286)

Sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ ada kelapangan dan sesungguhnya di samping kesulitan ada kemudahan, karena itu bila engkau telah selesai dari suatu urusan pekerjaan, maka kerjakanlah yang lain dengan tekun
(QS. Al- Insyirah: 5-7)

Jangan terlalu santai akan sebuah waktu, ada jutaan orang yang ingin mendahului kita
(Penulis)

“Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda hidup selamanya”(Mahatma Gandhi)

Pengetahuan diperoleh dengan belajar, Kepercayaan dengan keraguan, keahlian dengan berlatih, dan cinta dengan mencitai
(Thomas Szasz)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tua penulis yang terhormat, yang tersayang, yang penulis banggakan, sebagai panutan dalam hidup, yaitu Ayah Syahrel Effendi dan Ibu Sri Astuti. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan dan semua hal yang telah diberikan kepada penulis semua limpahan kasih sayang dan semua nasihat yang tidak akan pernah bisa terbalas.

Untuk yang tersayang Adik-Adiku, Amita Sari dan Ari Yatma, keluarga besar dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat dan kepercayaan bagi penulis untuk terus menjadi kebanggaan.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan dan sahabat-sahabat yang senantiasa membantu, memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan karya tulis ini. Serta Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Penulis memperoleh bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Sehingga atas kesempatan serta kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang telah tulus dan ikhlas melancarkan jalan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan selaku dosen pembahas dan penguji saya dengan segala saran dan arahan yang diberikan kepada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak I Wayan Suparta, S.E., M.Si. Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan yang berharga untuk perkembangan studi penulis.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T,S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan arahan, perhatian, motivasi, dukungan, ilmu, dan saran kepada penulis hingga skripsi terselesaikan.

6. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan arahan, saran, dan tambahan ilmu dengan penuh ketelitian agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. SSP. Pandjaitan, Pak Nairobi, Pak Moneyzar, Pak Arief, Pak Yoke, Prof. Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Saimul, Pak Thomas, Pak Dedi, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Marselina, Ibu Zulfa, Ibu Ratih, Ibu Ida, Ibu Asih, Ibu Tiara, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Ibu Yati, Ibu Mimi, Pak Kasim. Mas Bolang, Kyai, dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.
9. Teruntuk Ibu dan Bapak tercinta yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu menjadi kebanggaan keluarga. Dan yang selalu memberikan tuntunan dan kasih sayang yang tiada tara yang dengan sabar menikmati semua prosesku. Terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan, jasa Ibu dan Bapak tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa.
10. Teruntuk Paman dan Tante terimakasih yang selalu memberikan arahan, nasehat, semangat, dan masukan selama Andika menempuh perkuliahan.
11. Teruntuk Ummi Yanti, terimakasih sudah mau membersamai sejak awal kuliah selalu mengingatkan untuk revisian dan selalu memberi semangat, semoga akan terus selalu bersama hingga akhir tua.
12. Teruntuk Sahabatku M. Hadi Muktadir terimakasih atas kebersamaannya selama saya menempuh perkuliahan dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau membantu penulis dalam mengarahkan revisian, terima kasih telah mendengarkan kebahagiaan serta keluh kesah selama kuliah, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

13. Teruntuk temanku, Nafsiah, Desi, Diah Intan, Rili Yunita, Elsa, Siti Lia, anggraini, Wini, Sabilla, Nabila, Alvina, surnita, vania, Tri Windarti, Resilia, suci, Ni nengah, Dion, Razaka, Rayhan, Petrus, Bagus windu, Rizki Antasa, Riski Alamsyah, Manda bagas, deffa, devis, grahito, Bimo, Kemal, terimakasih atas kebersamaannya selama saya menempuh perkuliahan dan, terima kasih telah mendengarkan kebahagiaan serta keluh kesah selama kuliah, terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
14. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan 2018, 2019,2020,2021 dan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk segala pengalaman yang luar biasa kepada penulis.
15. Keluarga besar kuliah kerja nyata (KKN) Desa Durian, Usman, Kiki, Okta, Anisa, Lutfi, dan Ketrin, terimakasih untuk hari hari menyenangkan, perhatian, dukungan, motivasi, dan bantuannya, see you onthe top!
16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Andika Pratama. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Andika. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
17. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik untuk pengembangan lebih lanjut sangatlah diharapkan penulis. Semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT berlipat ganda. Aamiin

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teoritis	12
1. Kemiskinan	12
2. Peran dan Fungsi Pemerintah	16
3. Upah Minimum Provinsi	20
4. Indeks Pembangunan Manusia	21
5. Produk Domestik Regional Bruto.....	25
2.2 Tinjauan Empiris	29
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis Penelitian.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	38
3.2 Batasan Variabel.....	38
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	39
3.4 Metode Analisis Data	41
3.4.1 Metode Regresi Data Panel	41
3.4.2 Pemilihan Metode Regresi Data Panel	45

3.4.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	46
3.4.4 Pengujian Hipotesis Statistik	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskripsi data penelitian	50
1. Upah Minimum Provinsi	51
2. Indeks Pembangunan Manusia	54
3. Produk Domestik Regional Bruto.....	56
4.2 Analisis Regresi Data Panel	58
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	61
4.4 Hasil Hipotesis	62
4.5 Nilai Individual Effect.....	64
4.5 Implikasi Penelitian	72
1. Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.....	72
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia.....	73
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan 16 Provinsi di Indonesia	75
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Indonesia Periode 2015-2021	3
Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut 16 Provinsi Periode 2015-2021	4
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (<i>vicious circle of poverty</i>).....	15
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1. Data Angka UMP per 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2021 dalam satuan ribu rupiah	51
Gambar 4.2 Data Angka IPM per 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2021 dalam satuan ribu rupiah	54
Gambar 4.3 Data Angka PDRB per 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2015 – 2021 dalam satuan ribu rupiah	56
Gambar 4.4 Uji Normalitas	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris	29
Tabel 3.1 Batasan Variabel	38
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif di 16 Provinsi di Indonesia	50
Tabel 4.2 Nilai Rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah upah minimum provinsi di 16 provinsi di Indonesia.....	52
Tabel 4.3 Nilai Rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah Indeks Pembangunan Manusia di 16 provinsi di Indonesia	54
Tabel 4.4 Nilai Rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah Produk Domestik Regional Bruto di 16 provinsi di Indonesia.	57
Tabel 4.5 Uji Chow	59
Tabel 4.6 Uji Hausman	60
Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier	60
Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas.....	61
Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda (Random Effect Model).....	62
Tabel 4.10 Nilai Individual Effect 16 Provinsi di Indonesia	64
Tabel 4.11 Uji Probabilitas Koefisien Regresi (Uji t).....	70
Tabel 4.12 Uji F	71
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R ²)	71

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah permasalahan global, terutama di negara berkembang. Kemiskinan adalah terbatasnya jumlah makanan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan rendahnya kualitas layanan pendidikan, lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terbatasnya fasilitas perumahan dan sanitasi. Tingginya beban penduduk karena rendahnya kepercayaan terhadap kepemilikan dan penguasaan air bersih dan tanah, degradasi lingkungan dan sumber daya alam, jaminan keamanan yang buruk, partisipasi yang rendah dan tanggung jawab keluarga yang berat (Suhandi et al., 2018).

Indonesia, sebagai negara berkembang, terus menghadapi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk tingginya angka kemiskinan, tingginya jumlah penduduk miskin, dan kesenjangan sosial ekonomi. Dengan populasi penduduk 261 juta jiwa pada tahun 2017, Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia dan paling besar di Asia Tenggara. Negara-negara berkembang terkenal dengan peningkatan populasinya yang tidak terkendali sehingga dapat menghambat ekspansi ekonomi.

Menurut (Nurwati, 2008) kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang abadi dan menghantui kehidupan masyarakat. Menurut (Haughton, 2012) selalu dikaitkan dengan kesenjangan dan kerentanan karena krisis, seperti krisis keuangan atau jatuhnya harga produk pertanian, dapat memaksa orang-orang yang saat ini tidak dianggap miskin untuk menjadi miskin kapan saja. Ketidakmampuan untuk menyamai standar hidup penduduk setempat karena kurangnya sumber daya dikenal sebagai kemiskinan. Ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan perumahan merupakan ciri dari kondisi ketidakmampuan ini. Ketidakmampuan guna mencukupi standar hidup pada umumnya, semisal standar kesehatan masyarakat dan pendidikan, juga akan terkena dampak dari rendahnya kapasitas pendapatan. Kemampuan memperoleh uang cukup untuk

memenuhi kebutuhan penting mengartikan suatu masyarakat termasuk dalam kategori miskin (Nugroho, 2009).

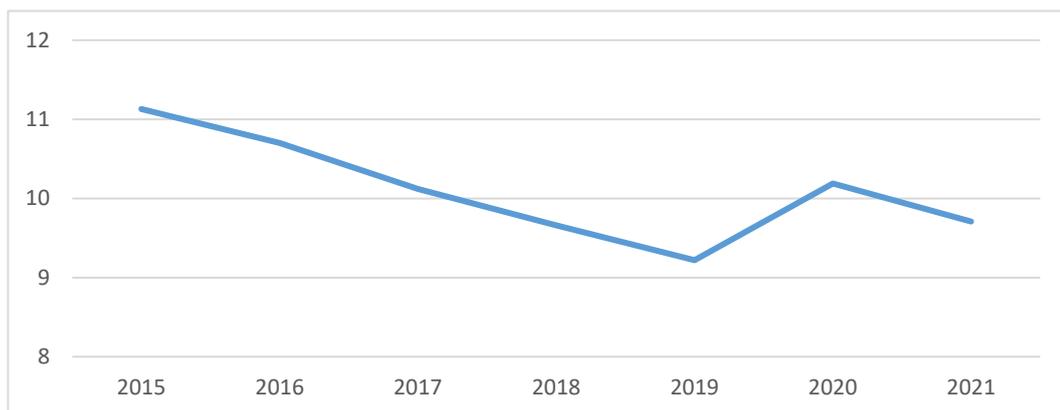
Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh peradaban yakni kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah berlangsung lama dan berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, meskipun seringkali keberadaannya diabaikan. Karena mereka sendiri yang mengalami dan mendefinisikan kemiskinan, maka masyarakat yang termasuk dalam kategori ini menganggapnya sebagai suatu kenyataan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Suliswanto, 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan papan serta kesehatan dan pendidikan (Ambya & Ciptawaty, 2022).

Di banyak negara, permasalahan kemiskinan telah meluas, tidak hanya sekedar pendapatan yang tidak memadai, tetapi juga mencakup ketidakberdayaan sosial dan politik (Suryawati., 2011). Kemiskinan terkadang dipandang sebagai salah satu permasalahan pembangunan yang diakibatkannya oleh efek buruk dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yang akhirnya memperbesar kesenjangan pendapatan di dalam dan antar wilayah (Harahap, 2006). Fokus kajian pembangunan sekarang tidak hanya pada penyebab kemiskinan, namun juga mengidentifikasi seluruh kemungkinan penyebab kemiskinan. (Kuncoro, 2004) mengidentifikasi penyebab kemiskinan yaitu: sebagai penyebab utama kemiskinan: Pertama, pola kepemilikan sumber daya yang tidak setara menjadi sebab sebaran pendapatan yang tidak sama, yang pada gilirannya menghasilkan kemiskinan pada tingkat mikro. (Todaro, 2004) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan atau bahkan oleh definisi tradisional mengenai nilai; sebaliknya, yang penting adalah apa yang dapat dicapai seseorang dengan harta benda, bukan apa yang dimilikinya atau seberapa puaskah seseorang terhadapnya.

Kemiskinan menurut BPS dimaknai ketidakmampuan guna membayar kebutuhan pokok makanan dan non-makanan jika dipandang dari sudut pandang pengeluaran. (Supriatna., 1997) berargumen kalau kemiskinan ialah suatu keadaan yang tidak bisa diatasi seorang individu dan tidak timbul karena pilihan individu tersebut.

Suatu penduduk dianggap miskin jika tingkat pendidikannya rendah, tidak produktif dalam bekerja, pendapatannya rendah, gizi dan kesehatannya buruk, serta tidak menerima tunjangan yang memadai, yang semuanya berkontribusi pada lingkaran setan ketidakberdayaan. Rendahnya tingkat pendidikan informal disebabkan oleh kemiskinan, yang juga terlihat dari kelangkaan sumber daya manusia dan rendahnya kualitas pendidikan formal dan non-formal.

Setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, tetap menghadapi realitas sosial berupa kemiskinan. Indonesia ialah satu diantara negara berkembang yang masih berjuang melawan kemiskinan. Ada banyak sisi dari masalah kemiskinan, yang membuatnya menjadi sangat rumit. Oleh karena itu, program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan haruslah bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan hadir di setiap aspek kehidupan Masyarakat (Nasir, 2008).

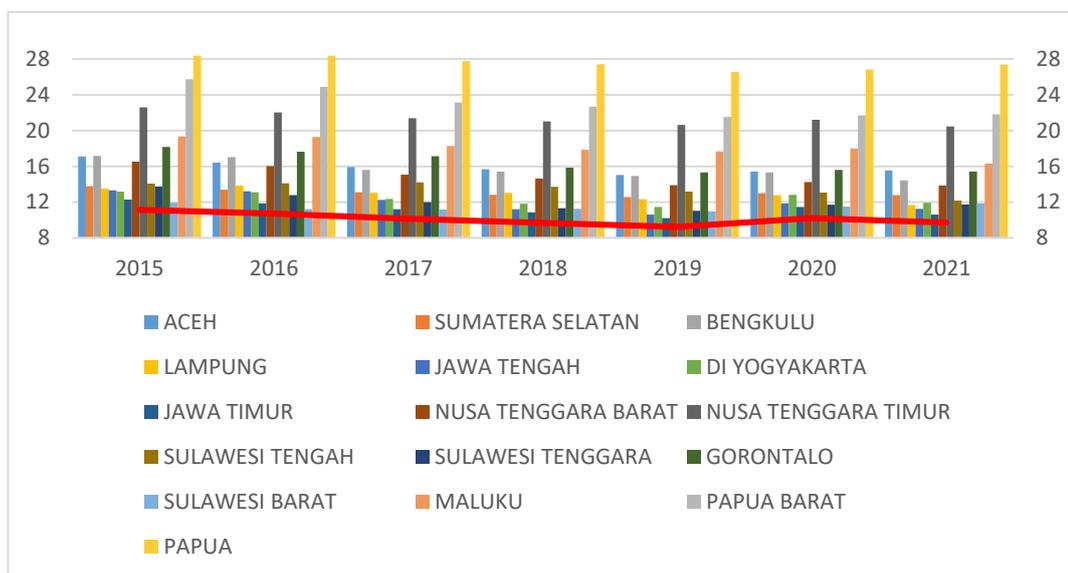


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Indonesia Periode 2015-2021

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Berdasar data BPS, angka kemiskinan di Indonesia menurun antara tahun 2015 hingga 2019, tetapi di tahun 2020 ada kenaikan sebesar 0,97% dari tahun 2019. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat variasi tingkat kemiskinan Indonesia antara tahun 2015 dan 2021. (Suryandari, 2017) menegaskan bahwa kenaikan tingkat inflasi, penurunan pendapatan, dan kenaikan biaya kebutuhan menjadi kontributor utama meningkatnya kemiskinan penduduk.

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang punya banyak permasalahan pembangunannya yang belum terselesaikan, satu diantaranya ialah permasalahan kemiskinan. Kemiskinan ialah masalah yang menghalangi Indonesia untuk memajukan negara kesejahteraan sosialnya dan juga dapat menimbulkan ancaman terhadap perekonomian negara. Kemiskinan ialah satu diantara indikator sukses tidaknya sebuah negara melakukan Pembangunan (Claro, S., Paunesku, D. & Dweck, 2016). Kemiskinan multidimensional merupakan permasalahan kompleks yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan (Giyarsih, 2014).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut 16 Provinsi Periode 2015-2021

Berdasarkan Gambar 1.2, dari 34 provinsi di Indonesia mengalami masalah kemiskinan, tetapi hanya 16 provinsi yang punya nilai di atas rata-rata Indonesia tahun 2015 sampai 2021. Perbandingan kondisi kemiskinan di 16 provinsi bisa dilihat pada Gambar 1.2, Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Aceh, Bengkulu tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, begitu juga dengan Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Karena kondisi tersebut maka penelitian akan mengambil 16 provinsi di Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut (Kuncoro, 2000), Ketimpangan kualitas SDM berujung pada kemiskinan. Ketika SDM tidak mencukupi, produktivitas menurun, yang pada gilirannya berdampak pada gaji. Pendidikan bisa dijadikan cara untuk meminimalisir keterbelakangan dan ketertinggalan dalam sebuah sektor tertentu serta meningkatkan produksi. Pendapatan yang tinggi akan memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak dan terhindar dari kemiskinan.

Ketidakmampuan untuk menyamai standar hidup penduduk setempat karena kurangnya sumber daya dikenal sebagai kemiskinan. Tidak adanya kapabilitas guna membayar keperluan semacam sandang, pangan, dan perumahan ialah ciri dari kondisi ketidakmampuan ini. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup pada umumnya, persyaratan untuk kesehatan masyarakat dan pendidikan, juga akan terkena dampak dari rendahnya kapasitas pendapatan.

Dalam definisi yang paling ketat, kemiskinan adalah tidak adanya sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang, seperti uang dan harta benda. Kemiskinan, secara umum, adalah ketidakmampuan seseorang, keluarga, masyarakat, atau bahkan suatu negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, atau peluang sosial ekonomi lainnya. Mengingat kemiskinan merupakan persoalan yang rumit dan mempunyai banyak segi, maka kehati-hatian harus digunakan ketika melakukan tindakan mitigasi. menyeluruh dan mencakup seluruh aspek hidup masyarakat dan ditangani dengan cara terpadu (Suryawati, 2005).

Kurangnya aset dan pendapatan guna memenuhi kebutuhan termasuk perumahan, makanan, pakaian, layanan kesehatan, dan pendidikan adalah akar penyebab kemiskinan. Kriteria yang umum dikenal dan digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan adalah pendapatan rendah yang secara akurat mencerminkan norma-norma masyarakat. Ada kemungkinan untuk berargumen bahwa pendapatan merupakan kriteria kesejahteraan sosial karena standar hidup aktual suatu masyarakat menunjukkan tingkat kesejahteraannya (Murbyanto, 1996).

Berdasarkan (Word Bank, 2004), Minimnya sumber daya guna memenuhi persyaratan ini seperti perumahan, makanan, pakaian, dan standar kesehatan dan pendidikan yang layak huni adalah salah satu penyebab kemiskinan. Selain itu,

kemiskinan biasanya terkait dengan kurangnya prospek kerja; mereka yang termasuk dalam kategori ini umumnya menganggur, berpendidikan rendah, dan memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Dengan kata lain, strategi ini perlu diterapkan lintas sektor dan aktor secara terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Upah mempunyai kekuatan untuk mendorong produktivitas pekerja bagi penduduk lokal yang bekerja. Upah Minimum Provinsi atau disingkat UMP merupakan upah minimum yang berlaku bagi seluruh kabupaten atau kota dalam suatu provinsi. Pemerintah menetapkan upah minimum atau UMP untuk setiap provinsi di Indonesia. UMP mungkin berdampak pada tingkat kemiskinan karena upah minimum yang tidak memadai dapat mengunci masyarakat dalam lingkaran kemiskinan jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, jika UMP ditetapkan sangat tinggi, maka dunia usaha tidak mampu membayar gaji yang diperlukan untuk tetap berjalan. Oleh karena itu, pemilihan UMP yang tepat sangat penting untuk menurunkan kemiskinan. Kebijakan Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena rendahnya pendapatan (Kauffman, 2000).

Sederhananya, kemiskinan ditandai dengan rendahnya standar hidup yang umum terjadi di masyarakat dan ditandai dengan tingkat kekurangan materi yang dialami oleh beberapa individu dibandingkan dengan standar hidup orang lain. Kemiskinan merupakan permasalahan yang memiliki banyak segi dan rumit yang dapat berdampak pada laju pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian terhadap permasalahan kemiskinan. Tujuan utama dari sejumlah inisiatif dan program pembangunan adalah pembangunan daerah, khususnya di daerah-daerah miskin. Tentu saja, pembangunan daerah perlu dikoordinasikan dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tujuan utama masing-masing daerah. Tujuan pembangunan nasional ditetapkan dengan Menurunkan angka kemiskinan merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas pembangunan nasional (Dermoredjo, 2003).

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM didasarkan pada BPS 2015–2021. Ini memperhitungkan berbagai komponen mendasar kualitas hidup. Empat komponen data yang digunakan untuk menyusun IPM adalah angka harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama pendidikan, dan belanja. Harapan hidup menilai keberhasilan dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan belanja. Pengaruh pembelajaran. Untuk kebutuhan dasar tertentu, masyarakat tampil rata-rata. - pengeluaran rata-rata per orang sebagai ukuran pendapatan yang menilai kemampuan untuk menjalani kehidupan yang terhormat. IPM mengukur aspek-aspek penting pembangunan manusia yang diperkirakan menunjukkan kondisi kapasitas fundamental suatu populasi (Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani, 2018).

Karena beragamnya potensi sumber daya yang dipunya setiap daerah, baik kehidupan sosial, SDA, maupun SDM, maka kemampuan pembangunan setiap daerah bersifat unik. Sepanjang tahap pembangunan, ada daerah yang mempunyai SDA melimpah namun sumber daya manusianya terbatas, sedangkan tempat lain mempunyai sumber daya manusia yang berlimpah, baik kuantitas maupun kualitasnya, namun sumber daya alamnya terbatas. Pertambahan investasi maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output dan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi yang dimiliki masyarakat (Anggreani et al., 2023). Hal ini selanjutnya menimbulkan disparitas laju pembangunan yang menentukan derajat pertumbuhan ekonomi dan disparitas kesejahteraan di setiap lokasi (Annur, 2013).

Kumpulan pengukuran yang dikenal sebagai indikator pembangunan manusia dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemajuan umat manusia baik dari segi kehidupan non-fisik (intelektualitas) maupun fisik (kesehatan dan kesejahteraan). Keadaan fisik masyarakat dipengaruhi oleh indikator-indikator pembangunan seperti daya beli dan angka harapan hidup; dampak non fisik terlihat pada standar pendidikan di masyarakat (Sutikno et al., 2019).

Indikator strategis umum untuk menilai efektivitas dan upaya keseluruhan program pembangunan di suatu wilayah adalah indeks pembangunan manusia, atau IPM. Pada hal ini, IPM dipandang ialah cerminan rencana pembangunan yang sudah

dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Demikian pula, IPM dapat digunakan untuk mengukur dan menampilkan kemajuan program pembangunan sepanjang suatu periode, baik pada awal maupun pada akhir program. IPM merupakan indikasi yang sangat komprehensif mengenai pengaruh kinerja pembangunan daerah karena memberikan informasi mengenai kualitas penduduk suatu daerah dalam hal angka harapan hidup, kecerdasan, dan standar hidup yang tinggi (Nadya Agustin, M. Syurya Hidayat, 2019).

IPM berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan program pembangunan dan menetapkan tujuan perumusan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Hal ini juga berfungsi sebagai kerangka alokasi anggaran, mengikuti kebijakan luas yang diputuskan oleh para pengambil keputusan dan kebijakan. Data diperoleh dari situs BPS pada periode tahun 2015-2021 dengan satuan Rupiah.

Salah satu metrik utama dalam kerangka fundamental pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya IPM dalam pengelolaan pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator pembangunan manusia lainnya akan digunakan untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan yang ditargetkan. Dapat dikatakan bahwa jika suatu daerah mempunyai IPM yang tinggi, idealnya penduduknya mempunyai kualitas hidup yang tinggi, atau tingkat kemiskinannya harus rendah. IPM menjadi tolak ukur perkembangan suatu daerah, sehingga harus mempunyai korelasi positif dengan kondisi kemiskinan di daerah tersebut. Menurut (Suliswanto, 2010), Berdasarkan beberapa aspek mendasar kualitas hidup, IPM menilai kemajuan yang dicapai menuju pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menilai kinerja pembangunan di sektor pendidikan dengan menggambarkan berbagai komponen, seperti daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok, yang terlihat dari rata-rata pengeluaran, partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Menjalani hidup yang panjang dan sehat adalah inti dari sektor kesehatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang ditentukan oleh kenaikan produk regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama perkembangan perekonomian suatu daerah. Diyakini bahwa masalah krusial kemiskinan akan terpengaruh secara positif

oleh tanda-tanda optimis kemajuan ekonomi. Sebagai indikator tren, PDRB sering digunakan. Sumber pendapatan potensial suatu daerah tumbuh secara proporsional dengan PDRB-nya. Jumlah orang yang dipekerjakan dipengaruhi oleh PDRB, dengan premis yang mendasari adalah bahwa semua unit ekonomi di suatu wilayah menghasilkan lebih banyak barang dan jasa bernilai tambah ketika PDRB meningkat. Peningkatan volume produksi ini akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja (pengangguran akan berkurang) dan dapat mengurangi kemiskinan. Namun pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan seluruh penduduk di wilayah tersebut. Kemiskinan belum berkurang secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Pada kenyataannya, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) bukan satu-satunya indikator kemajuan ekonomi; tingkat kesetaraan pendapatan antar kelas sosial dan individu yang memperolehnya juga harus diperhitungkan (Parwata, I Made. I Wayan S. dan Fridayana Y, 2016)

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga elemen yang diprioritaskan: proses, output per kapita, dan pertumbuhan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tren yang berlalu begitu saja; itu adalah sebuah proses. Pembangunan sektoral dan pembangunan daerah harus dilakukan secara bersamaan agar pertumbuhan sektoral di daerah selaras dengan prioritas dan potensi daerah. Seluruh biaya seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi oleh badan usaha dikenal dengan produk domestik regional bruto (PDRB), yang merupakan ukuran nilai tambah yang diciptakan suatu daerah sebagai hasil upaya gabungan dari seluruh sektor ekonomi dan jasa (Sadono Sukirno, 2000).

PDRB sendiri dapat dilihat sebagai keseluruhan nilai produk dan jasa yang diperoleh seluruh unit usaha di suatu wilayah, atau besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha. Semakin tinggi angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, maka semakin cepat pula perekonomiannya tumbuh dan semakin berkembang pula perekonomian daerah tersebut. Kesimpulannya, keterkaitan antara faktor endogen yaitu faktor yang berasal dari dalam Kawasan dan faktor eksogen yang berasal dari luar Kawasan dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Model makroekonomi biasanya digunakan untuk memperhitungkan pertumbuhan regional (Afrizal, 2013). (Kuncoro, 2001) berpendapat bahwa Pendekatan pembangunan tradisional lebih erat kaitannya dengan pembangunan yang lebih mengutamakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sementara itu, peningkatan angka PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan meningkatnya PDRB suatu daerah maka muncullah sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Pada kenyataannya, PDRB mempengaruhi lapangan kerja karena diasumsikan bahwa ketika PDRB meningkat, nilai tambah produksi akan meningkat di seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan produksi ini akan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja (pengangguran akan menurun) dan dapat menurunkan angka kemiskinan (Parwata, I Made. I Wayan S. dan Fridayana Y, 2016).

Menurut (Norton, 2002) berpendapat bahwa Tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tinggi, dan sejahtera dikaitkan dengan pertumbuhan PRDB yang tinggi dan pertumbuhan PDRB yang tinggi. Hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan standar hidup yang baik, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Warga negara di suatu negara atau wilayah menjadi lebih kaya jika PDRB-nya lebih tinggi. Oleh karena itu, PDRB sering digunakan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antar negara.

(Sukirno, 2006) Menyatakan bahwa Terlepas dari besarnya kenaikan tersebut, Produk Regional Bruto (PDRB) tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perhitungan tarif ini tidak hanya memperhitungkan jumlah total PDRB tetapi juga distribusi pendapatan di seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat konteks di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut “Pengaruh UMP, IPM, dan PDRB terhadap Kemiskinan Di 16 Provinsi di Indonesia” pada periode tahun 2015-2021.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum Provinsi mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?
2. Apakah IPM mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?
3. Apakah PDRB mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2021?
4. Apakah UMP, IPM dan PDRB secara bersama-sama mempengaruhi Kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia Pada tahun 2015-2021?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Upah Minimum Provinsi mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?
2. Untuk mengetahui bagaimana IPM mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?
3. Untuk mengetahui bagaimana PDRB mempengaruhi kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?
4. Untuk mengetahui bagaimana UMP, IPM, dan PDRB secara bersama-sama mempengaruhi Kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2021?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi pemerintah, yaitu untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi peningkatan kemiskinan melalui kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah.
2. Dapat menginspirasi pembaca dengan menonjolkan faktor krusial penentu kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan permasalahan serius yang erat kaitannya dengan pembangunan atau dampak suatu kebijakan yang mengakibatkan turunnya taraf kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Seseorang mengalami kemiskinan ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik makanan maupun non-makanan. Ada beragam sudut pandang mengenai arti kemiskinan. Absennya kemakmuran (suatu kondisi kemakmuran) dan batas-batas kemakmuran merupakan definisi kemiskinan yang diberikan oleh Bank Dunia. Dalam teori ekonomi, kesejahteraan seseorang meningkat secara proporsional dengan konsumsi produk mereka. Pada tingkat kesejahteraan ini, seseorang dapat didefinisikan sebagai memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk produk yang ingin dikonsumsi. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kesejahteraan, maka kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kehidupannya (Indonesia et al., 2009).

Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan pangan dan non-makanan, ditetapkan sebagai kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2015–2021. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai keseluruhan jumlah uang yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai kebutuhan dasarnya, yang meliputi 2100 kalori per orang per hari untuk makanan dan beberapa kebutuhan non-makanan seperti papan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.

b. Ukuran Kemiskinan

Karena kemiskinan mempengaruhi negara dan individu, banyak orang yang masih mengkhawatirkannya. Banyak indikator yang mencerminkan keadaan dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia diperlukan untuk merencanakan, mengawasi, dan menilai berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi

kemiskinan. Metrik ini mencakup total dan proporsi penduduk miskin serta berbagai karakteristik relevan lainnya sepanjang waktu dan wilayah geografis. Menurut Badan Pusat Statistik, pendekatan kebutuhan dasar (BPS) mengukur kemiskinan dengan memanfaatkan gagasan tentang kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Definisi kemiskinan ini adalah ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif dari sudut pandang pengukuran. Ketidakberdayaan di atas batas kemiskinan yang ditetapkan disebut kemiskinan absolut. Sebaliknya, perbedaan pendapatan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dikaitkan dengan kemiskinan relatif, atau dapat dilihat dari perspektif kesenjangan sosial, dimana perbedaan standar hidup yang lebih besar antara kelas atas dan kelas bawah berarti proporsi pendapatan yang lebih tinggi. Penduduk yang dianggap miskin sehingga berujung pada kemiskinan, agak terkait dengan masalah distribusi pendapatan (Amir, 2013).

Garis kemiskinan adalah ambang batas moneter yang, jika ditinjau dari sudut pandang konsumsi, akan menentukan seberapa besar seseorang dapat dianggap miskin. Ini menggambarkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seseorang, termasuk makanan dan non-makanan. Setiap negara memiliki definisi kemiskinan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh variasi regional dan persyaratan penyediaan kebutuhan dasar yang berbeda-beda (Susanti, 2013).

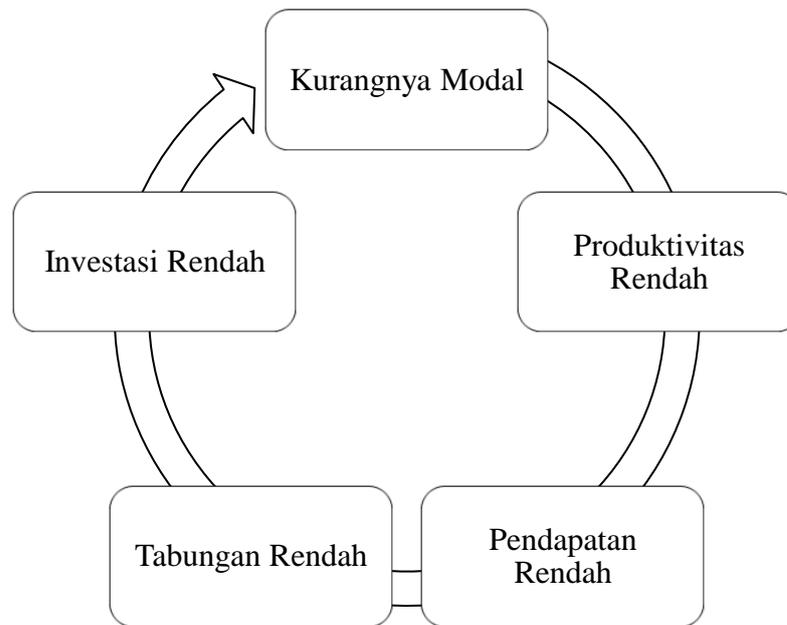
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015–2021 menyatakan bahwa mereka yang memiliki pendapatan harian kurang dari Rp 7.057 dianggap berada di bawah garis kemiskinan. Keputusan ini didasarkan pada penentuan garis kemiskinan, yang memperhitungkan permintaan non-makanan dan pangan. Berdasarkan pendapatan suatu negara, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan. orang-orang yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata penduduk suatu negara. Berdasarkan hal ini, Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebesar USD \$2 per orang per hari.

c. Penyebab Kemiskinan

Karena produktivitas perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan, kemiskinan disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan pendapatan untuk menutupi kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan pembangunan. Pendapatan rendah adalah salah satu kriteria kemiskinan yang paling diterima dan sering digunakan karena mencerminkan standar masyarakat yang sebenarnya (Adriani, Evi, 2015).

(Di et al., 2013) berusaha menjelaskan Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi. Pertama, pola kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang menyebabkan kemiskinan pada tingkat mikro, yang mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata atau timpang. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia. terbatasnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan terbatasnya kapasitas produksi sehingga menurunkan kompensasi. Keadaan yang tidak adil, prasangka, faktor keturunan, dan rendahnya tingkat pendidikan seringkali menjadi akar penyebab rendahnya standar sumber daya manusia. Ketiga, penyebab utama kemiskinan adalah disparitas ketersediaan modal.

Hipotesis lingkaran setan kemiskinan, yang menyatakan bahwa produktivitas yang buruk disebabkan oleh kurangnya modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan, merupakan sumber dari ketiga penyebab kemiskinan (Di et al., 2013) Seseorang dengan produktivitas yang buruk akan memiliki potensi pendapatan yang terbatas. Pendapatan yang rendah akan menyebabkan rendahnya investasi dan tabungan. Investasi yang tidak mencukupi akan menyebabkan kekurangan modal, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah prospek kerja.



Sumber: Kuncoro, 1997 dalam jurnal (Di et al., 2013)

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

Menurut Regnar Nurkse dalam (Faisal, 2013) Menurut teori siklus kemiskinan, produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan penduduk, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, tabungan, yang merupakan sumber pembangunan modal komunal, tidak dapat dilakukan di negara-negara berkembang. Sementara itu, teori perangkap kemiskinan Maltus menjelaskan mengapa perluasan populasi pada akhirnya akan melebihi persediaan pangan yang tersedia. Akan ada batasan jumlah makanan ketika hal ini terjadi. Jika masyarakat berpendapatan rendah tidak makan, pada akhirnya mereka akan kelaparan.

(Nurkse, 2006) menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan berhubungan dengan dua lingkaran perangkap kemiskinan. Sisi penawaran menggambarkan betapa rendahnya tingkat produksi menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya kemampuan menabung. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam menabung mengakibatkan rendahnya produksi modal (investasi), sehingga menimbulkan defisit modal dan menurunkan produktivitas. dll. Namun, permintaan menunjukkan bahwa sangat sedikit insentif untuk berinvestasi di negara-negara berkembang karena kecilnya pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan gaji masyarakat sangat rendah akibat

buruknya tingkat produksi. Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan), pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup (Nizar Firmansah, 2015).

2. Peran dan Fungsi Pemerintah

Berbeda dengan teori klasik, teori Keynes memperkirakan bahwa upah akan turun jika pasar tenaga kerja melimpah. Lebih jauh lagi, teori Keynes mengantisipasi kerugian daripada keuntungan dari meningkatnya biaya tenaga kerja karena penurunan upah mencerminkan penurunan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Akibatnya, produsen akan menderita dan tidak dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mempertahankan tingkat permintaan agregat, yang pada gilirannya memungkinkan industri pariwisata menghasilkan lapangan kerja. Penting untuk digarisbawahi bahwa sektor pariwisata menghasilkan lapangan kerja, dan keterlibatan pemerintah dibatasi hanya untuk memenuhi tingkat permintaan total. Guna menjaga daya beli masyarakat, hal ini bertujuan agar pendapatan tetap stabil. sejalan dengan proyeksi dan untuk menghentikan resesi yang semakin parah.

Menurut Adam Smith, kemampuan pemerintah untuk mengatur perekonomian sangatlah penting terlepas dari tingkat kapitalisme suatu negara, karena ada tiga fungsi mendasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan tidak ada pihak yang dapat melakukannya sendiri. Musgrave pun mempertegas peran dan fungsi pemerintah ini menjadi 3 yaitu peran alokasi, distribusi dan peran stabilisasi. Khusus bagi Indonesia di mana pemerintah sebagai motivator (*agent of development*) dan pengendali pembangunan, maka peran pemerintah masih dominan.

Menurut R.A. Musgrave, pemerintah memainkan tiga peran dalam perekonomian modern, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran alokasi
- b. Peran distribusi

c. Peran stabilitasasi

Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa sumber daya keuangan didistribusikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan potensinya. Karena kelemahan sistem pasar, diperlukan intervensi pemerintah dalam alokasi sumber daya ekonomi (SDE) yang tidak ideal. Tugas pemerintah adalah memastikan adanya distribusi uang yang adil, khususnya di masyarakat. Keberhasilan dalam pemerataan pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- a. Kepemilikan faktor produksi
- b. Penawaran dan permintaan faktor produksi yang dipengaruhi oleh kemampuan teknologi. Misalnya, kebutuhan akan taman kanak-kanak padat karya akan berkurang jika teknologi diatur secara ketat.
- c. Sistem warisan
- d. Pendidikan, bakat, dan kemampuan semuanya berperan dalam kemampuan seseorang menghasilkan uang.

Timbulnya peran pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan karena bila diserahkan kepada pasar, maka tidak efisien dan tidak adil. Konsep tentang efisiensi dikemukakan oleh Pareto, Kaldor dan Hicks. Efisiensi menurut Pareto bila terjadi *better off- no worst off*, artinya apabila seseorang atau lebih merasa diuntungkan tanpa seorang individupun merasa dirugikan. Sedangkan efisiensi menurut Kaldor dan Hicks apabila diberikan suatu kompensasi yang memadai bagi yang mengalami kerugian sehingga posisi yang dimaksud bias dalam bentuk pengenaan pajak, sehingga pajak sebagai alat pendistribusian pendapatan yang efektif. Pengertian pajak yaitu sejumlah iuran yang dipaksakan harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah karena masyarakat telah memanfaatkan atau menggunakan barang-barang yang disediakan oleh pemerintah. Komponen pajak yang paling efektif untuk mengatasi kesenjangan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat yaitu pajak progresif, yaitu pengenaan tarif pajak yang tinggi bagi pendapatan tinggi dan tarif yang rendah bagi pendapatan rendah. Pajak merupakan salah satu instrumen dalam kebijaksanaan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran pemerintah.

Tanggung jawab pemerintah untuk menjaga koherensi kebijakan dikenal dengan peran stabilisasi. Sebab, keadaan yang rumit terkadang bisa menyebabkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak sejalan satu sama lain. Misalkan kebijaksanaan alokasi dapat berbenturan dengan kebijaksanaan distribusi. Sebagai satu contoh untuk membangun suatu perekonomian memerlukan dana yang besar. Salah satu sumber dana berasal dari investasi yang ditanamkan pengusaha baik dari luar dan dari dalam negeri di lembaga-lembaga keuangan. Agar terkumpul dana yang besar dari investor, maka diciptakan iklim yang kondusif agar investor mau menanamkan modalnya di dalam negeri, maka pemerintah mengurangi beban pajaknya. Kondisi ini bila diamati merupakan penyimpangan dari tujuan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang distribusi pendapatan. Sehingga tujuan untuk mendistribusikan pendapatan secara lebih merata semakin jauh dari sasaran. Sebagai ilustrasi lainnya dari kepentingan yang bisa saling berbenturan adalah bila permintaan terhadap mobil menurun akibat krisis ekonomi perusahaan mengurangi TK pengangguran meningkat konsumsi sepatu menurun pendapatan turun.

Bagi karyawan, upah merupakan sarana untuk menjamin kelancaran pendapatan karena merupakan tanda terima dari perusahaan sebagai bentuk kompensasi, termasuk juga tunjangan bagi keluarga karyawan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa saat ini, pemerintah harus mengendalikan upah minimum provinsi yang harus ditawarkan dunia usaha kepada pekerjanya, sehingga dengan terpenuhinya permintaan barang dan jasa maka tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan. Selain dikelola oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah seperti bank diperkirakan akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan memperkuat sektor pendapatan. Pola perekonomian di masa lalu telah mengalami perubahan paradigma, dengan tenaga kerja dan harga komoditas yang mencerminkan hampir seluruh nilai barang, dan kecenderungan untuk menghitung bentuk fisik sumber daya yang statis memberi jalan pada pola ekonomi yang lebih bergantung pada pengetahuan yang diperoleh dari sumber daya manusia. Dalam hal ini, peran dan tugas pemerintah adalah menjaga pekerja tingkat bawah agar gajinya

tidak berkurang; untuk tujuan ini, ia menetapkan upah minimum sebagai semacam intervensi upah. Pemerintah menetapkan peraturan upah minimum untuk mencegah perusahaan membayar karyawan atau pekerja baru secara sembarangan. Undang-undang upah minimum berfungsi sebagai pengaman bagi pekerja, yaitu sebagai upaya preventif agar gaji tidak turun ke tingkat yang sangat rendah (Kadek Sudiarta, 1945).

Pemerintah mendorong penelitian dan kemajuan dalam meningkatkan produktivitas manusia, filosofi baru pertumbuhan ekonomi, yang membantu memaksimalkan peningkatan sumber daya manusia atau modal manusia (*Human Capital*). Pendidikan sangat penting untuk membangun potensi mencapai pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengasimilasi teknologi kontemporer. Selain itu, kesehatan yang baik memudahkan untuk memperoleh pendidikan, yang merupakan prasyarat lain untuk meningkatkan produksi. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi mempunyai peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kesehatan dan pendidikan. Memiliki kesehatan dan pengetahuan yang baik akan memudahkan memperoleh gaji yang tinggi. Namun, memiliki gaji yang besar akan memudahkan penganggaran untuk hal-hal seperti kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah daerah harus menaikkan produk domestik bruto (PDRB) untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan daerah. Meningkatnya PDRB berarti menumbuhkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan karena meningkatkan permintaan akan tenaga kerja, yang pada gilirannya menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Bekerja meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup di negara kesejahteraan. Pemerintah daerah perlu terus berperan lebih besar dalam mengatur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) guna mengentaskan kemiskinan. Pemerintah daerah harus menekankan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai strategi untuk menurunkan angka kemiskinan. Secara khusus, mereka harus memastikan bahwa pertumbuhan terjamin dan mendistribusikan manfaat pertumbuhan dari sektor-sektor di mana

masyarakat miskin terutama bekerja pada bisnis-bisnis kontemporer yang padat modal seperti jasa. Oleh karena itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus mendapat perhatian utama dalam upaya ini oleh pemerintah daerah. Selain memiliki kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan, distribusi manfaat pertumbuhan PDRB yang adil dan merata akan mempengaruhi pembangunan di semua sektor pekerjaan.

3. Upah Minimum Provinsi

Tingkat kemiskinan tidak selalu menurun ketika suatu provinsi menaikkan upah minimum. Hal ini mungkin disebabkan oleh tren yang menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sering kali diikuti dengan hilangnya pekerjaan. Oleh karena itu, PHK akan berkontribusi pada meningkatnya tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan pasti akan meningkat akibat hal ini. Penggunaan teknologi akan lebih efisien dalam organisasi besar dengan kemampuan teknologi canggih dibandingkan menaikkan gaji karyawan.

a. Pengertian Upah minimum provinsi

Upah minimum dalam UMP sama untuk semua kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Setiap kabupaten atau kota dalam satu provinsi mempunyai UMP yang sama. Gubernur memutuskan UMP dengan mempertimbangkan usulan Dewan Pengupahan Provinsi. Perusahaan biasanya menerapkan teknologi yang lebih maju dan menghilangkan staf ketika gaji meningkat. Hal ini akan menyebabkan tingginya pengangguran, yang akan memperburuk kemiskinan, bukan mengentaskannya (Islami & Anis, 2006).

b. Tujuan Upah Minimum Provinsi

Menurut (Muhammad Iksan Syuhada, 2019) Upah minimum ditetapkan karena berbagai alasan antara tujuan penetapan upah minimum antara makro dan mikro. Dari sudut pandang makroekonomi, Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk: (a) mencapai keseimbangan pendapatan; (b) meningkatkan daya beli pekerja dan meningkatkan prospek kerja; (c) mengubah struktur biaya industri sektoral; dan (d) menaikkan upah minimum. di tingkat federal. meningkatkan output di tempat

kerja dan memperkuat disiplin dan etos kerja. Di sisi lain, upah minimum memiliki tiga tujuan di tingkat mikro: (a) menyediakan jaring pengaman untuk mencegah penurunan pendapatan, (b) mengurangi kesenjangan gaji antara karyawan dengan gaji terendah dan tertinggi dalam organisasi, dan (c) meningkatkan pendapatan untuk menambah angkatan kerja pada tingkat terendah.

Penetapan upah minimum memiliki dua tujuan, yaitu melindungi kinerja, kesejahteraan, dan kesehatan karyawan pada tingkat penghidupan minimal. Memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah adalah tujuan dari upah minimum, khususnya bagi pekerja miskin. Menaikkan Upah minimum akan menaikkan tingkat pendapatan masyarakat dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan dan kebebasan mereka dari kemiskinan (Kauffman, 2000).

4. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Kumpulan pengukuran yang dikenal sebagai indikator pembangunan manusia dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemajuan umat manusia baik dari segi kehidupan non-fisik (intelektualitas) maupun fisik (kesehatan dan kesejahteraan). Angka harapan tersebut menunjukkan perkembangan yang berdampak pada keadaan fisik masyarakat. penghidupan dan daya beli, sedangkan taraf pendidikan masyarakat menunjukkan pengaruh non fisik (Sutikno et al., 2019).

Indeks pembangunan manusia, atau IPM, adalah indikator strategis yang sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan upaya proyek pembangunan secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam hal ini, rencana pembangunan yang telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya dianggap tercermin dalam IPM. Demikian pula, kemajuan program pembangunan dapat diukur dan ditunjukkan dengan menggunakan IPM pada awal dan akhir inisiatif. IPM merupakan indikator yang cukup komprehensif mengenai pengaruh kinerja pembangunan daerah karena menunjukkan kualitas penduduk suatu daerah dalam hal angka harapan hidup, kecerdasan, dan kondisi kehidupan yang tinggi (Nadya Agustin, M. Syurya Hidayat, 2019).

IPM berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan program pembangunan dan menetapkan tujuan perumusan kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Hal ini juga berfungsi sebagai kerangka alokasi anggaran, mengikuti kebijakan luas yang diputuskan oleh para pengambil keputusan dan kebijakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu wilayah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di wilayah tersebut (Kumara et al., 2021).

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tata Cara Pengembangan Sumber Daya Manusia Merupakan indeks yang memungkinkan kita menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebuah indikator yang diterima secara umum mengenai pentingnya inisiatif pembangunan manusia dan mudah untuk dihitung secara operasional, terdiri dari tiga komponen. Tiga elemen dari 21 adalah peluang untuk panjang umur dan sehat, pengetahuan, dan keberadaan atau kualitas hidup yang bermartabat. Kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita. Angka harapan hidup saat lahir digunakan untuk menghitung peluang hidup. Rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf penduduk di atas usia 15 tahun digunakan untuk menghitung pengetahuan. Proses pengembangan karyawan baru merupakan proses yang panjang dan memerlukan kontak bertahap antar semua departemen (UNDP, 2008)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015–2021 merupakan ukuran keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan beberapa aspek fundamental kualitas hidup. Empat komponen IPM yang diperoleh dari statistik terukur adalah angka harapan hidup, yang mengukur efektivitas layanan kesehatan; tingkat melek huruf; rata-rata durasi pendidikan; dan daya beli masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Hal ini digambarkan dengan menghitung pengeluaran rata-rata per kapita sebagai alat untuk mengukur pendapatan dan mengevaluasi pencapaian standar hidup yang layak. IPM mengukur

aspek-aspek utama pembangunan manusia, yang diukur untuk mewakili kondisi keterampilan dasar masyarakat.

B. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai ukuran pembangunan sumber daya manusia dan terus-menerus dibuat dan diperbarui karena tidak pernah memberikan gambaran lengkap mengenai pembangunan, menurut Program Pembangunan PBB (UNDP, 1995), Tiga (tiga) komponen IPM yang mempengaruhi baik tidaknya kemajuan pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

a. Komponen Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan yang buruk juga berperan dalam kemiskinan dengan menurunkan produktivitas. Sebagai suatu kondisi kesejahteraan mental, fisik, dan sosial yang memungkinkan individu menikmati kehidupan yang memuaskan baik pada tingkat sosial maupun ekonomi, kesehatan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka harapan hidup merupakan metrik yang berharga untuk mengevaluasi efektivitas suatu pemerintah karena mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara umum. Angka kematian bayi per seribu penduduk dan indeks harapan hidup saat lahir dapat digunakan untuk menghitung indeks harapan hidup, yang biasa disebut dengan “umur terpanjang”. Tujuan dari variabel ini adalah untuk menggambarkan angka harapan hidup dan hidup sehat masyarakat saat ini dengan memuat informasi angka kelahiran dan kematian/tahun. Metode langsung digunakan karena sulitnya mencari informasi tentang orang yang meninggal dalam kurun waktu tertentu. Indeks angka harapan hidup, yang menetapkan standar angka harapan hidup berdasarkan statistik minimum dan maksimum, diperoleh secara tidak langsung dari dua data dasar: perkiraan jumlah kelahiran hidup dan perkiraan jumlah anak hidup dari perempuan yang menikah.

Angka terbesar yang digunakan untuk menghitung indeks adalah 85 tahun, dan terendah adalah 25 tahun. Sebab, indeks angka harapan hidup didasarkan pada nilai maksimal angka harapan hidup yang ditentukan oleh kriteria UNDP.

b. Komponen Pendidikan

Derajat pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut (Aswin & Yasa, 2021) memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat membantu seseorang terhindar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan yang tinggi diperlukan bagi orang miskin yang menginginkan karier bergaji tinggi. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi hanya terbatas pada kelompok masyarakat kaya, karena masyarakat miskin tidak mampu membiayai pendidikan mereka di luar tingkat sekolah menengah dan universitas. Oleh karena itu, tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan. Namun, jika kemiskinan terus berlanjut, maka akan sangat sulit untuk memperoleh pendidikan yang baik, karena angkatan kerja modern menuntut daya saing dan sumber daya yang berkualitas tinggi. Manusia memerlukan pengetahuan, keterampilan, kemahiran teknologi, dan kemampuan untuk mandiri melalui pendidikan. Komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf dihitung dengan membagi proporsi orang dewasa berusia di atas 15 tahun yang melek huruf dengan jumlah total orang dewasa berusia di atas 15 tahun dalam suatu populasi. UNDP menyatakan bahwa terdapat angka melek huruf maksimum sebesar 100 dan angka minimum sebesar 0. Nilai nol menunjukkan negara bagian yang berbeda, sedangkan nilai 100% atau seluruhnya menunjukkan negara bagian yang memiliki kemampuan tersebut. Sebaliknya, rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia di atas 15 tahun dalam pendidikan formal disebut sebagai lama bersekolah. Lima belas tahun adalah jangka waktu penyelidikan terlama.

c. Komponen Daya Beli

UNDP menggunakan apa yang disebut indeks riil per kapita untuk menghitung daya beli (atau dimensi) tingkat kehidupan yang wajar. Jangan menggunakan PDRB per kapita untuk penghitungan IPM daerah (provinsi atau provinsi/kota), Sebab, konsentrasi IPM yang mewakili daya beli masyarakat sebenarnya tidak tercermin dalam PDB per kapita yang hanya mencerminkan produksi suatu daerah.

C. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Keunggulan IPM menurut BPS.

1. Mengevaluasi efektivitas inisiatif peningkatan taraf hidup masyarakat (populasi/masyarakat).
2. Memastikan klasifikasi wilayah atau negara atau tingkat pembangunannya.
3. IPM dianggap sebagai data strategis di Indonesia karena digunakan untuk mengalokasikan dana Dana Alokasi Umum (DAU) selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.

5. Produk Domestik Bruto (PDRB)

Menurut BPS 2015–2021, produk domestik bruto suatu daerah atau PDRB adalah penjumlahan nilai tambah yang diciptakan oleh seluruh unit usaha dan perekonomian, serta nilai barang dan jasa akhir yang disuplainya.

Perubahan PDRB suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur kemajuan perekonomian daerah, menurut (Suryono, 2010) Mendorong ekspansi ekonomi adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sumber-sumber pertumbuhan ini diperkirakan akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur makro keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno, teori tentang pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. Teori Pertumbuhan Klasik Menurut Adam Smith, Perusahaan akan tumbuh dan berkembang jika terjadi pertumbuhan populasi, sehingga memperluas pasar dan mendorong spesialisasi.
- b. Teori Schumpeter, Kecakapan kewirausahaan memainkan peran utama dalam menentukan kemajuan ekonomi. Menurut pandangan ini, kemajuan teknologi sebagian besar didorong oleh semangat kewirausahaan dari mereka yang mampu mengenali peluang untuk meluncurkan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Ini menyoroti inovasi yang dihasilkan oleh pengusaha. Lebih banyak lapangan kerja diciptakan dengan mendirikan

- perusahaan baru dan mengembangkan perusahaan yang sudah ada, sehingga membantu mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahunnya.
- c. Teori Harrod-Domar, Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang konsisten diperlukan pembentukan modal atau investasi. Output produk dan jasa meningkat seiring dengan bertambahnya modal. Dengan demikian, teori ini menyatakan bahwa prasyarat tertentu harus dipenuhi agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh secara stabil dari waktu ke waktu.
 - d. Teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai "Teori Neo-Klasik" atau "Teori Pertumbuhan Neo-Klasik", yang diciptakan oleh Abramovits dan Solow, menyoroti bagaimana tiga elemen penting yakni tenaga kerja, modal, dan teknologi yang dapat digabungkan untuk menghasilkan faktor pertumbuhan ekonomi yang stabil. di suatu bangsa. Di sisi lain, Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern menjelaskan tiga elemen yang saling berhubungan yang merupakan salah satu variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat: produksi, kemajuan teknologi, dan reorientasi ideologi terbuka untuk menerima inovasi baru

Teori Keynes, Jhon Maynard Keynes, adalah teori ekonomi yang didasarkan pada teori ekonom Inggris John Maynard, yang hidup pada abad ke-20. Pendekatan ini mendorong perekonomian campuran, dimana sektor publik dan swasta sama-sama mempunyai peran yang signifikan. Menurut Buku yang di tulis oleh (Ridwan & Nawir, 2021) Pengeluaran pemerintah merupakan aliran dana keluar dari berbagai sumber, termasuk perpajakan negara. Secara umum, pengeluaran pemerintah diperkirakan akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Akibat diadopsinya konsep negara kesejahteraan oleh pemerintah, maka pengeluaran pemerintah digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat agar pemerintah siap menggunakannya bila diperlukan baik untuk kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Sebab, masih bisa diperdebatkan bahwa belanja pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di suatu Negara jumlah uang yang dimilikinya.

PDRB berdasarkan harga konstan, yang didasarkan pada harga pada tahun tertentu dalam hal ini tahun 2000 menunjukkan nilai tambah produk dan jasa. (Sadono Sukirno, 2000) Ukuran pertumbuhan ekonomi tahunan berdasarkan harga konstan adalah produk domestik bruto (PDRB). Nilai tambah barang dan jasa yang diukur dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang menjadi tahun dasar atau acuan dalam menghitung atau mengevaluasi output, biaya, dan komponen nilai tambah dikenal dengan produk domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.

Menurut (Kuncoro, 2001) menyatakan bahwa pembangunan yang menekankan pada peningkatan produk daerah bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota lebih banyak disebut dengan pendekatan pembangunan tradisional. Sementara itu, peningkatan angka PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Saat ini hanya ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk menghitung PDRB: sisi penggunaan dan sisi sektoral/lapangan usaha. Selain itu, harga berlaku dan harga konstan juga dimasukkan dalam penghitungan PDRB. PDRB Total menunjukkan total nilai tambah penduduk yang dihasilkan selama periode waktu tertentu. Menurut Case and Fair (2010), menyatakan bahwa ada tiga pendekatan yaitu teknik produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran untuk menentukan angka PDB dan PDRB dalam data BPS.

a. Pendekatan Produksi

Dalam kerangka metode produksi PDB dan PDRB, unit-unit produksi dalam paparan ini dipecah menjadi sembilan bidang fungsional atau sektor: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) kegiatan konstruksi; (6) perdagangan, hotel, dan restoran; (7) transportasi dan komunikasi; (8) jasa keuangan, real estat, dan komersial; dan (9) jasa (dengan utara). -termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan rumus: $Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$.

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

P_1 = harga barang ke-1

P_n = harga barang ke-n

Q_1 = jenis barang ke-1

Q_n = jenis barang ke-n

b. Pendekatan Pengeluaran

Dalam konteks pendekatan pengeluaran PDB dan PDRB, hal-hal berikut ini dianggap sebagai komponen permintaan akhir: (1) pengeluaran konsumsi akhir organisasi nirlaba swasta dan rumah tangga; (2) konsumsi umum; (3) pendapatan domestik bruto; (4) perubahan persediaan; dan (5) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor). Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $Y = C + I + G + (EX - IM)$, dimana G melambangkan belanja pemerintah, C melambangkan konsumsi, I melambangkan investasi, EX melambangkan ekspor, dan IM melambangkan impor.

c. Pendekatan Pendapatan

PDB dan PDRB adalah produk domestik bruto serta nilai imbalan yang diberikan kepada elemen produksi di suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun) ketika mereka berpartisipasi dalam proses produksi. Sebelum pajak dan pajak langsung lainnya yang termasuk dalam gaji yang diharapkan termasuk gaji, pensiun dasar, bunga modal, dan keuntungan. Depresiasi dan pajak tidak langsung bersih (pajak tidak langsung dikurangi subsidi) juga termasuk dalam definisi PDRB ini. menerapkan rumus tersebut, dimana Y mewakili produk domestik bruto, yaitu $Y = r + w + i + p$.

r adalah pendapatan dari sewa, w adalah pendapatan dari gaji atau upah,

i adalah pendapatan dari bunga, p adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan.

Hasil perhitungan PDRB yang dilakukan dengan menggunakan ketiga teknik tersebut adalah sama. Akibatnya, jumlah total yang dibelanjakan akan sama dengan jumlah total barang dan jasa jadi yang diproduksi, dan juga harus sama dengan jumlah total uang yang diterima untuk biaya-biaya yang terkait dengan produksi.

2.2 Tinjauan Empiris

Sejumlah penelitian terdahulu relevan dan berkaitan dengan tulisan para peneliti sebelumnya mengenai dampak produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap tingkat kemiskinan. Studi-studi berikut termasuk dalam daftar ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Islami & Anis, 2006)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan Variabel Bebas: Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan	Ordinary Least Square (OLS)	Hasil estimasi memperlihatkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara bersama-sama upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
2.	(Dita Sekar Ayu, 2018)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan Variabel Bebas: Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Penganggur	Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel	Hasil menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, sementara variabel Upah Minimum

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		an Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum		Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.
3.	(Nadya Agustin, M. Syurya Hidayat, 2019)	Variabel Terikat : Tingkat kemiskinan Variabel Bebas: pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP)	Alat analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa : 1) Secara simultan pertumbuhan ekonomi, IPM dan UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat, kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Merangin. 2) Pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat, kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Merangin, 3) IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat, kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Merangin. 4) UMP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan akan tetapi UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Merangin.
4.	(Muhammad Iksan Syuhada, 2019)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita, dan upah minimum

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Bebas: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB dan Upah Minimum	regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM).	berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten/kota di pulau Jawa.
5.	(Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani, 2018)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan Variabel Bebas: PDRB, Tingkat pengangguran dan IPM	Alat analisis yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu Fixed Effect Model (FEM) atau Least Square Dummy	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian maka pemerintah disarankan untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan pengoptimalan pelayanan kesehatan.
6.	(Amir, 2013)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan	Analisis Regresi Linier Berganda (OLS)	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh positif

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Bebas: PDRB, Jumlah Pengangguran, Angka Kemiskinan, Usia Harapan Hidup, UMP (Upah Minimum Provinsi) Jambi, Tingkat kepadatan penduduk, dan Angka melek huruf		<p>dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Jambi. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan secara bersama-sama Terhadap pengangguran di Kota Jambi 42,6 persen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui korelasi antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pengangguran di Kota Jambi adalah negatif dan sangat rendah.
7.	(Aswin & Yasa, 2021)	Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan	Analisis Regresi Panel Fixed Effect Model	Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Variabel Bebas: Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Pertumbuhan Penduduk		pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
8.	(Amalia Islami, 2016)	Variabel Terikat Tingkat Kemiskinan Variabel Bebas: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Provinsi (UMP)	penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model fixed effect	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, serta UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan secara simultan, variabel PDRB, IPM dan UMP berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
9.	(Di & Yogyakarta, 2020)	Variabel Terikat:	Alat analisis yang digunakan adalah panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah,

No	Peneliti	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Tingkat Kemiskinan	data dengan bantuan eviews 8 yang dianalisis dengan metode Fixed effect Model (FEM).	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Pengeluaran Riil Perkapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
10.	(Adriani, 2015)	Evi, Variabel Terikat: Tingkat Kemiskinan	Analisis Regresi Linier Berganda (OLS)	Berdasarkan hasil analisis data dan Pembahasan maka secara statistik hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi pada $\alpha = 5 \%$. Secara parsial hanya tingkat pendidikan yang signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi pada $\alpha = 20\%$. Pengaruh tingkat pendidikan dan pendapatan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang pada hakikatnya merupakan pernyataan seberapa baik kinerja masing-masing teori dalam menawarkan jawaban atau pengganti jawaban atas permasalahan yang diberikan, merupakan sintesa dari sejumlah gagasan yang ditemukan dalam studi literatur (Hamid, 2010).

Di Indonesia, seperti di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan adalah sebuah realitas sosial. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berjuang melawan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan mempunyai banyak segi dan sangat sulit. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan secara terpadu (Nasir, 2008).

Salah satu penyebab kemiskinan, menurut (Word Bank, 2004) adalah kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan termasuk perumahan, makanan, pakaian, dan standar kesehatan dan pendidikan yang layak huni. Kemiskinan juga terkait dengan kurangnya prospek pekerjaan; individu yang termasuk dalam kategori ini biasanya tidak memiliki pendidikan formal, menganggur, dan seringkali memiliki kesehatan yang buruk. Dengan kata lain, strategi ini perlu diterapkan lintas sektor dan aktor secara terintegrasi, terpadu, dan terkoordinasi.

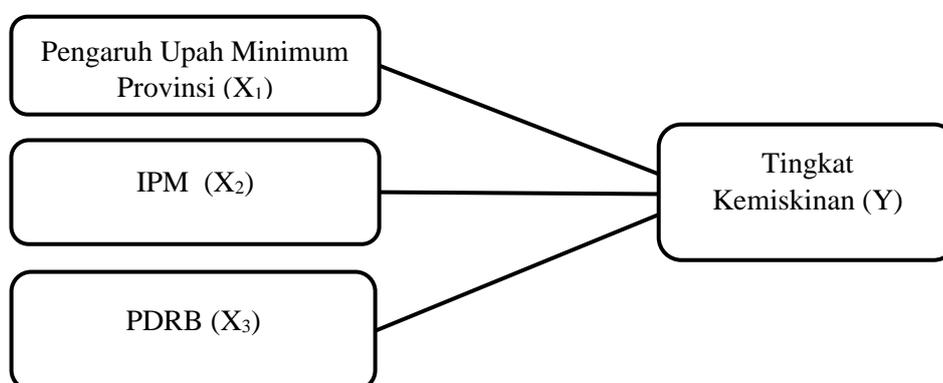
UMP mungkin berdampak pada tingkat kemiskinan karena pekerja bisa menjadi miskin jika upah minimum ditetapkan terlalu rendah sehingga menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, jika UMP ditetapkan sangat tinggi, maka dunia usaha tidak mampu membayar gaji yang diperlukan untuk tetap berjalan. Oleh karena itu, pemilihan UMP yang tepat sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk memperbaiki nasib masyarakat yang berpenghasilan rendah menghalangi mereka memenuhi kebutuhan dasar adalah penerapan undang-undang upah minimum provinsi (Kauffman, 2000).

Kumpulan pengukuran yang dikenal sebagai indikator pembangunan manusia dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemajuan umat manusia baik dari segi kehidupan non-fisik (intelektualitas) maupun fisik (kesehatan dan kesejahteraan).

Keadaan fisik masyarakat dipengaruhi oleh indikator-indikator pembangunan seperti daya beli dan angka harapan hidup; dampak non-fisik terlihat jelas pada standar pendidikan masyarakat (Sutikno et al., 2019).

PDRB sendiri dapat dipahami sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah, atau nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh entitas ekonomi. Semakin tinggi angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, maka semakin cepat pula perekonomiannya tumbuh dan semakin berkembang pula perekonomian daerah tersebut. Kesimpulannya, keterkaitan antara faktor endogen yakni faktor yang berasal dari dalam Kawasan dan faktor eksogen yang berasal dari luar Kawasan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan regional biasanya dijelaskan oleh model makroekonomi (Afrizal, 2013).

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah, teori-teori, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Diduga Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia.

2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia.
3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia.
4. Diduga Upah Minimum Provinsi, Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto, secara bersama – sama memiliki Pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 16 Provinsi di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Data yang dipakai pada kajian deskriptif kuantitatif ini ialah data sekunder. Data yang berkaitan dengan topik kajian yang telah dianalisis dan dipublikasikan oleh lembaga disebut data sekunder. Data panel dari 16 provinsi di Indonesia dan data cross-sectional dari data time series yang mencakup tahun 2015–2021 digunakan dalam penelitian ini. Enam belas provinsi di Indonesia yang ditemukan pada kajian ini ialah sebagai berikut: Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Barat Sulawesi, Maluku, Papua Barat, Papua. Data sekunder dari BPS yang dimuat di situs resmi dipakai pada kajian ini.

3.2 Batasan Variabel

Penelitian ini mencakup tiga variabel independen yaitu upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik regional bruto. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Detail mengenai batasan variabel ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Batasan Variabel

Nama Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan	Y	Persen	BPS
Upah Minimum Provinsi	X ₁	Rupiah	BPS
Indeks Pembangunan Manusia	X ₂	Persen	BPS
Produk Domestik Regional Bruto	X ₃	Juta Rupiah	BPS

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Konsep batasan variabel pada kajian dapat didefinisikan sebagai berikut agar pengetahuan tentang variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian lebih mudah dipahami:

1. Kemiskinan (Y)

Ketimpangan kualitas SDM berujung pada kemiskinan. Ketika SDM tidak mencukupi, produktivitas akan menurun, yang pada akhirnya akan punya dampak pada gaji. Pendidikan bisa dijadikan cara untuk mengurangi keterbelakangan dan ketertinggalan dalam sebuah sektor tertentu serta meningkatkan produksi. Pendapatan yang tinggi akan memungkinkan mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak dan terhindar dari kemiskinan.

Ketidakmampuan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak didefinisikan sebagai kemiskinan. Menurut (Kuncoro, 2000) mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berada di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Website BPS menyediakan data dalam satuan persen untuk tahun 2015–2021.

2. Upah Minimum Provinsi (X₁)

Upah minimum ialah upah paling rendah yang mencakup tunjangan tetap tetapi tidak masuk didalamnya kompensasi lembur yang diberikan kepada pekerja berdasarkan jabatan atau jenis pekerjaannya. Upah minimum yang berlaku di setiap kota atau kabupaten dalam suatu provinsi disebut upah minimum dalam satu provinsi. Tujuan dari upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang menganggur. Pendapatan masyarakat akan meningkat seiring dengan kenaikan upah minimum, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan pekerja dan buruh dari kemiskinan. Informasi yang dikumpulkan tahun 2015–2021 dalam satuan Rupiah dari website BPS.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X₂)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menilai jumlah kemajuan yang dicapai menuju pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen penting kualitas hidup. IPM adalah ukuran kualitas hidup yang dibuat dengan pendekatan tiga dimensi secara langsung. Dimensi tersebut diantaranya adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Ketiga dimensi ini mempunyai arti yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak hal. Pengukuran dimensi kesehatan didasarkan pada angka harapan hidup saat lahir. Selain itu, komponen pengetahuan diukur dengan menggunakan gabungan rata-rata lama sekolah dan indeks angka melek huruf. Sementara itu, parameter penghidupan yang layak ditentukan oleh ukuran daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, seperti jumlah uang yang biasanya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. informasi yang dikumpulkan tahun 2015–2021 dalam satuan Rupiah dari website BPS..

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X₃)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan produk domestik regional bruto atau PDRB adalah jumlah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit usaha di suatu wilayah domestik. Definisi yang lebih akurat adalah keseluruhan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi lokal. Produk domestik bruto (PDRB) merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan selama kurun waktu tertentu (satu tahun) yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas perekonomian suatu negara atau wilayah. Ada dua cara untuk menggambarkan PDRB: berdasarkan harga stabil saat ini atau berdasarkan harga saat ini. Nilai tambah barang dan jasa ditunjukkan oleh produk domestik bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Harga produk saat ini dapat digunakan untuk menghitungnya. informasi yang dikumpulkan tahun 2015–2021 dalam satuan Rupiah dari website BPS.

3.4 Metode Analisis Data

Persamaan berikut digunakan untuk menghasilkan model ekonometrik yang menguji hubungan antara tingkat kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia dengan produk regional bruto, indeks pembangunan manusia, dan gaji minimum provinsi.

3.4.1. Metode Regresi Data Panel

Salah satu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data panel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan E-Views 10 sebagai alat analisis. Data time series dan cross-section digunakan untuk membuat data panel (Widardjono, 2018). Deret waktu adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Di sisi lain, data cross-section adalah informasi yang dikumpulkan secara bersamaan dari beberapa provinsi di Indonesia. Menggabungkan 24 Dari kedua jenis data tersebut terlihat bahwa variabel penelitian tersebar di 16 provinsi di Indonesia (cross section) pada interval waktu yang berbeda-beda (time series).

Ketika data panel digunakan, akan dihasilkan koefisien intersep dan kemiringan yang berbeda untuk setiap orang dan periode waktu (Widardjono, 2018). Akibatnya, hal ini bergantung pada intersep, koefisien kemiringan, dan asumsi error term yang dibuat.

Ada berbagai asumsi yang dapat dibuat, seperti:

- a. Intersep dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu.
- b. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar individu.
- c. Slope tetap, tetapi intersep berbeda antar waktu.
- d. Semua koefisien (slope dan intersep) berbeda antar individu.
- e. Semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu.

Penggunaan data panel menawarkan sejumlah manfaat, antara lain dapat memberikan kebebasan lebih dan mengatasi permasalahan yang muncul ketika terjadi masalah variabel yang hilang.

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogUMP}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \beta_3 \text{LogPDRB}_{it} + \mu$$

Dimana:

KM_{it}	= Kemiskinan (Persen)
$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Konstanta
UMP_{it}	= Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
IPM_{it}	= Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
$PDRB_{it}$	= Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
μ	= <i>error term</i>

Data panel adalah jenis data yang sama. Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect adalah tiga metode yang perlu dipertimbangkan saat mengevaluasi model data panel. Ada beberapa keuntungan menggunakan data panel dibandingkan dengan data deret waktu atau data cross-section, termasuk:

1. Terdapat lebih banyak heterogenitas dalam data panel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa datanya mencakup waktu dan mencakup banyak orang.
2. Berdasarkan heterogenitas, data panel dapat digunakan untuk memperkirakan atribut masing-masing individu.
3. Data dari panel bisa lebih efisien, bervariasi, rendah kolinearitasnya, mempunyai derajat kebebasan yang lebih besar, dan lebih bermanfaat secara keseluruhan.
4. Data panel cocok untuk mengkaji perubahan dinamis karena pada dasarnya merupakan data cross-sectional yang berulang.
5. Data panel dapat mengevaluasi dan menunjukkan dengan tepat faktor-faktor yang tidak terlihat dalam data runtun waktu atau data cross-sectional murni.
6. Model perilaku yang lebih rumit dapat diperiksa dengan menggunakan data panel.

Melalui pengujian kelayakan tiga strategi pendekatan dasar yang digunakan dalam analisis data panel, pemilihan metode regresi data panel dapat dinyatakan dalam bentuk linier. Berikut tiga strategi pemilihan teknik regresi data panel:

a. Metode Common Effect Models (CEM)

Metode estimasi data panel yang paling sederhana adalah dengan menggunakan model regresi common effect yang sama dengan teknik Ordinary Least Squares (OLS) namun menggabungkan data cross-section dan time series tanpa melihat perbedaan individual dan temporal. Untuk menghitung model menggunakan data panel. Kami menyebutnya teknik estimasi *Common Effect Model* (Widarjono, 2018). Metode ini mengabaikan komponen individual dan temporal, sehingga menghasilkan perilaku yang konsisten di seluruh bisnis selama periode waktu yang berbeda (Gujarati & Porter, 2012). Persamaan model CEM adalah sebagai berikut

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	= Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t
X_{1it} dan X_{2it}	= Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
β_0	= Konstanta (intercept)
β_1 , dan β_2	= Koefisien regres
ε_{it}	= Residual (error term)

b. Fixed Effect Model (FEM)

Metode ini mengasumsikan bahwa meskipun kemiringannya tetap sama, namun penampang melintangnya berbeda. Dalam mengestimasi data panel dengan teknik FEM, digunakan variabel dummy, dengan nilai 1 untuk variabel yang berpengaruh dan 0 untuk variabel yang tidak berpengaruh. Tujuan boneka ini adalah untuk mencatat variasi penampang. Pendekatan Least Square Dummy Variables (LSDV) adalah nama paling populer untuk metode pemodelan ini. Rumus LSDV dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \beta_4 D_{4it} + \beta_n D_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

β_0	= Koefisien intersep yang merupakan scalar
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$	= Koefisien slope atau kemiringan

Y_{it} = Variabel terikat untuk individu ke-i dan unit waktu ke-t
 $X_{1it}, X_{2it} \dots X_{nit}$ = Variabel bebas individu ke-i dan unit waktu ke-t
 $D_1, D_2 \dots D_n$ = 1 untuk *cross section* yang berpengaruh dan 0 untuk *cross section* yang tidak berpengaruh.

c. Metode *Random Effect* (REM)

Dengan menggunakan teknik error term dalam metode REM, hubungan antara penampang dan deret waktu diverifikasi. Metode ini biasanya melihat perubahan individual dan temporal. Efisiensi parameter estimasi dapat dikurangi dengan mengurangi jumlah derajat kebebasan pada model sebelumnya, yaitu FEM dengan variabel dummy yang lebih banyak. Oleh karena itu, model FEM disempurnakan untuk menciptakan pendekatan REM. Model REM dibentuk dengan cara sebagai berikut: Y_{it} sama dengan $\gamma_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$. Kita berasumsi bahwa konstanta adalah variabel acak dengan nilai rata-rata β dengan memperlakukan β_0 sebagai tetap. Selain itu, nilai konstanta tiap satuan penampang dapat dinyatakan sebagai berikut: $\beta_{0i} = \beta + \varepsilon_{ii} = 1, 2, \dots, N$, dimana ε_{ii} adalah bilangan acak.

Dengan demikian persamaan REM awal dapat dituliskan kembali menjadi:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_0 X_{1it} + \beta_0 X_{2it} + \varepsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_0 X_{1it} + \beta_0 X_{2it} + w_{it}$$

Dimana :

$$w_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

Saat ini, kecerdasan yang terdiri dari ε_{it} dan ε_i adalah ungkapan yang salah. μ_i adalah komponen kesalahan cross-sectional (acak), sedangkan μ_{it} adalah komponen kesalahan gabungan. Akibatnya, model komponen kesalahan (ECM) adalah istilah umum untuk REM. Memilih antara efek acak dan tetap dapat dibantu dengan pertimbangan berikut (Gujarati & Porter, 2008)

- Jika T (jumlah unit deret waktu) besar namun N (jumlah unit cross-sectional) kecil, model efek tetap adalah metode penghitungan yang lebih sederhana. Hasil dari efek acak dan efek tetap dalam hal ini tidak berbeda secara substansial.

- Jika N tinggi dan T kecil, hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda secara signifikan. Jika diyakini bahwa unit cross-sectional yang dipilih untuk penelitian dipilih secara acak, maka efek acak harus diterapkan. Jika diyakini bahwa unit penampang yang dipilih untuk penelitian tidak dipilih secara acak, maka efek tetap harus digunakan.
- Jika setiap bagian merupakan kesalahan (ϵ_i), maka hanya saja Jika asumsi dasar dapat dipenuhi dan N dan T besar dan kecil, maka efek acak lebih efisien dibandingkan efek tetap.

Apabila N besar dan T kecil, kemudian apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

3.4.2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Estimasi data panel menggunakan tiga metodologi berbeda: Random Effect (REM), Fixed Effect (FEM), dan Common Effect (PLS). Memilih model terbaik jelas penting untuk pengujian. Dengan demikian, dua metodologi pengujian yang sering digunakan adalah uji Hausman dan uji Chow.

a. Uji Chow

Model pendekatan terbaik antara fixed effect dan common effect diidentifikasi dengan uji Chow yang menggunakan nilai distribusi statistik F sebagai acuan. Ketika nilai kemungkinan distribusi statistik F lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang ditentukan, model efek umum diterapkan; apabila nilai kemungkinan distribusi statistik F lebih rendah dari tingkat signifikansi maka diterapkan model pendekatan fixed effect (Widarjono, 2018).

Adapun hipotesis dari pengujian ini restricted F-Test yaitu:

H_0 : Model PLS (*restricted*)

H_a : *Fixed Effect Model (unrestricted)*

b. Uji Hausman

Untuk memilih antara model FEM dan REM untuk estimasi data panel, gunakan uji Hausman. Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Setelah melakukan uji Hausman, ditentukan distribusi statistik dengan Chi Square dan derajat kebebasan k. Jika nilai statistik Hausman melebihi nilai kritis dan model fixed effect menolak hipotesis nol, maka model tersebut adalah model yang tepat untuk digunakan. Sebaliknya, model efek acak sebaiknya digunakan jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis dan hipotesis nol tidak dapat ditolak. Widarjono (2013).

3.4.3. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Terdistribusi teratur atau tidaknya data tergantung pada hasil uji normalitas yang menentukan normalitas suku kesalahan dan variabel (variabel bebas dan terikat). Distribusi probabilitas gangguan sisa diasumsikan tidak berkorelasi, mempunyai varian yang konstan, dan mempunyai rata-rata yang diantisipasi sebesar nol dalam regresi linier normal klasik. Uji Jarque-Bera (JB-Test) dan pendekatan grafis digunakan untuk menentukan normal atau tidaknya distribusi residu. Nilai skewness dan kurtosis dihitung dengan menggunakan teknik J-B Test (Gujarati, 2010).

Hipotesis:

H_0 : data tersebar normal

H_a : data tidak tersebar normal

Kriteria Pengujian:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $J-B > \text{Chi-Square}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $J-B < \text{Chi-Square}$

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Gujarati, 2004), mendefinisikan multikolinieritas sebagai hubungan linier antar variabel independen. Uji multikolinieritas mencari bukti bahwa model regresi dan variabel independen mempunyai korelasi yang sempurna. Hipotesis multikolinieritas dalam penelitian ini dinilai menggunakan *Variance Inflation*

Factor (VIF) dan tingkat toleransi. Kedua ukuran tersebut menunjukkan masing-masing variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Ghozali, 2001). Sederhananya, variabel terikat merupakan hasil regresi masing-masing variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya. Toleransi merupakan ukuran variabilitas suatu variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Karena $VIF = 1/\text{toleransi}$, maka nilai toleransi yang rendah menunjukkan kolinearitas yang kuat dan setara dengan angka VIF yang tinggi. Angka cutoff yang diterima secara luas menurut Ghozali (2001) adalah nilai toleransi sebesar 0,1 atau sama dengan nilai VIF di atas 10, dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,1 disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 maka disimpulkan terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas.

3.4.4. Pengujian Hipotesis Statistik

Menurut Gujarati (2010), Berdasarkan analisis statistik dapat diketahui parameter-parameter yang akan diestimasi, seperti uji signifikansi parameter secara simultan (uji F) pada $\alpha = 5\%$ dan uji signifikansi parameter individual (uji t).

a. Uji Parsial (Uji-t)

Signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada $\alpha=5\%$ dipastikan dengan menggunakan uji t, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Pada contoh ini, nilai antara t-hitung dan t-tabel akan dibandingkan.

- Jika nilai t-hitung $>$ nilai t-tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a , yang berarti variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
- Jika nilai t-hitung $<$ nilai t-tabel maka H_0 diterima dan menolak H_a , yang berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah:

1. UMP (Upah Minimum Provinsi)

$H_0: \beta_1 = 0$ Nilai UMP tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 16 Provinsi di Indonesia.

$H_a: \beta_1 < 0$ Nilai UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 16 provinsi di Indonesia.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$H_0: \beta_2 = 0$ Nilai IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 16 Provinsi di Indonesia.

$H_a: \beta_2 < 0$ Nilai IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 16 provinsi di Indonesia.

3. Produk Domestik Bruto (PDRB)

$H_0: \beta_1 = 0$ Nilai PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 16 Provinsi di Indonesia.

$H_a: \beta_1 < 0$ Nilai PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 16 Provinsi di Indonesia.

b. Uji F Statistik

Pengujian ekstensif dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi simultan yang sering disebut dengan uji statistik f. Uji F digunakan untuk mengetahui relevan atau tidaknya model tersebut. Dengan menggunakan uji F, analisis varians menawarkan penjelasan (ANOVA). Untuk mengetahui apakah koefisien regresi β_1 , β_2 , dan β_3 sendiri atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat pada $\alpha = 5\%$, maka metode uji F dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) berikut: H_0 : Di 16 provinsi di Indonesia, dampak gabungan UMP, IPM, dan PDRB terhadap neraca transaksi berjalan adalah $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$. H_a : $\beta_1 - \beta_2 \neq \beta_3 \neq \dots = \beta_k \neq 0$ dimana $k = 1, 2, 3, k$ (Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan PDRB secara bersama-sama mempengaruhi neraca transaksi berjalan di 16 provinsi di Indonesia).

- Membandingkan F-hitung F-hitung melebihi $>$ F-tabel menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan sehingga menyebabkan diterimanya H_a dan ditolaknya H_0 . F hitung $<$ F tabel menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan sehingga menyebabkan penolakan H_a dan penerimaan H_0 .

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Selain untuk menentukan seberapa cocok garis regresi dengan data, koefisien determinasi (R^2) juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar garis regresi tersebut menjelaskan variasi Y. R^2 . Kisaran nilai koefisien determinasi adalah 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, kapasitas garis regresi untuk menjelaskan data aktual semakin meningkat. Garis regresi menjadi lebih buruk ketika mendekati nol. Koefisien determinasi yang tidak berubah disebut R^2 . Setelah itu, cari koefisien determinasi yang telah disesuaikan. Kami sedang mendiskusikan R yang dimodifikasi dalam contoh ini

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari kajian ini ialah guna mengetahui dan mengevaluasi hubungan antara kemiskinan di enam belas provinsi di Indonesia dengan UMP, IPM, dan produk regional bruto. Temuan penelitian dan perdebatan yang didukung oleh hipotesis yang disajikan pada bab sebelumnya memungkinkan kita mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada dampak nyata upah minimum provinsi terhadap kemiskinan. Hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* memperlihatkan kalau di 16 provinsi di Indonesia, Upah Minimum Provinsi tidak mempunyai dampak nyata terhadap kemiskinan. Melalui penggunaan estimasi pemodelan yang mencakup seluruh 16 provinsi, terlihat bahwa UMP tidak berdampak signifikan pada kemiskinan. Ini berarti kalau menaikkan upah minimum tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan atau penurunan kemiskinan.
2. Variabel kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh variabel IPM. Hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* menunjukkan kalau kemiskinan di 16 provinsi di Indonesia terkena dampak negatif IPM. Estimasi pemodelan yang melibatkan 16 provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak negatif yang signifikan pada IPM pada tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, kemiskinan akan menurun pada provinsi yang memiliki IPM lebih tinggi.
3. Ukuran kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh variabel PDRB. Hasil regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* menunjukkan bahwa di 16 provinsi di Indonesia, PDRB berdampak negatif terhadap kemiskinan. Estimasi pemodelan yang melibatkan 16 provinsi menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi secara negatif oleh PDRB sampai batas tertentu.

Hal ini berarti kemiskinan akan berkurang pada provinsi yang PDRBnya lebih besar.

4. Meskipun faktor IPM dan PDRB mempunyai dampak negatif terhadap kemiskinan, variabel Upah Minimum Provinsi tidak mempunyai dampak yang nyata. Temuan regresi data panel yang menggunakan pendekatan *Random Effect Model* menyoroti dampak buruk terhadap kemiskinan di enam belas provinsi di Indonesia. Melalui penggunaan estimasi pemodelan yang mencakup seluruh 16 provinsi, terlihat bahwa meskipun PDRB saja mempunyai dampak negatif yang cukup besar terhadap IPM, namun UMP tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyampaikan saran seperti dibawah:

1. Bagi peneliti, kajian ini bisa jadi acuan atau referensi bagi kajian sejenis atau mengerjakan kajian ekonomi lainnya. Jika Anda melakukan pencarian serupa, sebaiknya tambahkan detail pencarian Anda untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Penggerak utama pembangunan ialah SDM, sehingga pemerintah harus meningkatkan kualitasnya, dan tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan PDRB harus dimaksimalkan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, Alasannya, pemerataan pendapatan yang luas adalah syarat penting agar ekspansi ekonomi yang cepat dapat berkelanjutan. Dengan demikian, upah minimum adalah komponen yang membantu masyarakat mempertahankan tingkat hidup yang layak melalui daya beli mereka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa upah minimum tetap konsisten dengan kisaran referensi atau patokan yang ditetapkan oleh negara.
3. Maka dari itu mengatasi masalah kemiskinan diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan, pencapaian ketiga indikator utama (pendidikan, pendapatan, kesehatan)

dalam IPM dan terwujudnya tingkat penggunaan tenaga kerja yang maksimal atau pemanfaatan sumber daya manusia agar dapat produktif, mempunyai pekerjaan dan tidak menganggur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Evi, W. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(2), 47–51.
- Afrizal, F. (2013). *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Amalia Islami. (2016). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), dan Upah Minimum Provinsi (Ump) Terhadap Tingkat Kemiskinan Periode 2005-2004 (Studi Kasus 10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia)*.
- Ambya, A., & Ciptawaty, U. (2022). Hubungan antara belanja pemerintah, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi baru di Provinsi Lampung. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 157–166. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.17747>
- Amir, A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi Harlik*, Amri Amir, Hardiani Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi. 1(2), 109–120.
- Anggreani, M., Ratih, A., Husaini, M., Emalia, Z., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2015-2021. *Journal on Education*, 6(1), 6490–6507. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3871>
- Annur, R. . (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*.
- Aswin, D. A., & Yasa, Im. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(11), 4535–4562.
- Claro, S., Paunesku, D. & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*.
- Dermoredjo. (2003). *produksi Domestik Bruto, Harga, Kemiskinan*. 51.

- Di, K., Jekulo, K., & Annur, R. A. (2013). *mejobo kabupaten kudus*. 2(4), 409–426.
- Di, K., & Yogyakarta, P. D. I. (2020). *Pengaruh rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil perkapita, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi d.i yogyakarta*.
- Dita Sekar Ayu. (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur*.
- Faisal. (2013). “*Pengaruh tinngkat pendidikan dan tingkat kesehatan kesehatan, terhadap produktivitas dan jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat*”. Tesis, Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjung Pura, Pontianak.
- Giyarsih, S. R. (2014). *Pengentasan kemiskinan yang komprehensif di bagian wilayah terluar Indonesia - kasus Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Manusia Dan Lingkungan*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika*. Salemba Empat.
- Hamid. (2010). *Panduan Penulisan Skripsi*. Cetakan kesatu. FEIS UIN Press.
- Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.Hermanto.
- Haughton, jonathan dan S. R. K. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality)*, Jakarta: Selemba Empat.
- Indonesia, U., Di, D. A. N. K., Sentra, P., Indonesia, P., Santiko, B. N. U. R., Ekonomi, F., & Indonesia, U. (2009). *Analisis keterkaitan..., Bhima Nur Santiko, FE UI, 2009*.
- Islami, N., & Anis, A. (2006). *Pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di indonesia*.
- Kadek Sudiarta, I. B. W. P. (1945). *Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Upah Minimum*. 1–5.
- Kauffman. (2000). “Should you take aspirin to prevent heart attack”. *Journal of Scientific Exploration*, 14, 621–641.
- Kumara, B. P., Gunarto, T., & Ratih, A. (2021). *Disparitas dan Konvergensi Pendapatan Perkapita Propinsi di Kawasan Timur Indonesia Provincial Income Disparity and Convergence in Eastern Indonesia*. *Ekonomikawan*, 21(1), 46–56. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7166>
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

- Kuncoro, M. (2001). *Otonomi daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, strategis, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, strategis, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammad Iksan Syuhada. (2019). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa*.
- Murbyanto. (1996). *Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Nadya Agustin, M. Syurya Hidayat, E. U. (2019). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi , indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin*. 8(1), 53–64.
- Nasir, M. M. S. & M. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*, Vol. 5 No.
- Nizar Firmansah. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*.
- Norton, S. W. (2002). Economic Growth and Poverty. *In Search of Trickle Down*.
- Nugroho, H. (2009). *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*.
- Nurkse. (2006). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.
- Nurlaila Maysaroh Chairunnisa, Y. N. Q. (2020). *Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap kemiskinan pada provinsi jawa barat*. 7(1), 147–161.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan Model Pengukuran, permasalahan dan Alternatif Kebijakan*.
- Parwata, I Made. I Wayan S. dan Fridayana Y. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, (Vol. 4).
- Ridho Andykha, Herniwati Retno Handayani, N. W. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. 33(2), 113–123.
- Ridwan & Nawir. (2021). *Buku Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadono Sukirno. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan pemikiran dari*

klasik sampai keynesian. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.

- Saputra. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.*
- Shidiq Ramdan Dinata, Mahendra Romus, Y. (2020). *Faktor faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.* 2, 116–137.
- Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Informatika Global*, 9(2), 77–82. <https://doi.org/10.36982/jig.v9i2.543>
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Suliswanto. (2010). Pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan.*
- Supriatna. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Humaniora Utama. Bandung.*
- Suryandari, A. M. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–136. <https://core.ac.uk/download/pdf/132422015.pdf>
- Suryawati. (2011). *Teori Ekonomi Mikro. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.*
- Suryawati. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. JMPK. 108/No03/S.*
- Suryono. (2010). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.*
- Susanti, S. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel.* 9(1), 1–18.
- Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., Tumangkeng, S. Y. L., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2019). *Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.* 19(01), 88–98.
- Suyono, B., & Hermawan, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Ekomaks*, 2(9), 1–15.
- Todaro, M. p. (2004). *Pembangunan Ekonomi 1 Dunia Ketiga Edisi: Kedelapan,*

Penerbit Erlangga. Jakarta.

UNDP. (1995). *Human Development Report 1995.*

UNDP. (2008). *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia Published Jointly by BPS-Statistic Indonesia.*

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan eviews. upp stim ykpn.*

Word Bank. (2004). *Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin. The World Bank, Jakarta.*